

KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI JAWA BARAT

H. Muchsin al-Fikri

FISIP Universitas Sangga Buana Bandung

muchsinalfikri2020@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 selain telah mendisrupsi seluruh bidang kehidupan, juga telah mendisrupsi pola komunikasi politik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda maupun masyarakat umum. Selain diteror oleh bahaya Virus yang sangat mematikan, masyarakat juga diancam dengan maraknya misinformasi atau disinformasi yang tidak kalah bahayanya dari virus itu sendiri. Masyarakat dibanjiri dengan berita-berita bohong atau hoax tentang pandemi Covid-19 yang beredar luas di media sosial sehingga masyarakat menjadi bingung. Tak dapat dihindari, masyarakat kini tengah berada di era ketidakpastian sehingga mereka dengan mudah mempercayai sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya serta membagikannya ke banyak orang. Pada saat yang sama, masyarakat pun sudah kehilangan trust (kepercayaan) kepada sumber informasi formal dalam hal ini pemerintah dan media-media mainstream karena dinilai sering tidak konsisten dalam segala hal. Dari aspek istilah saja, sudah berkali-kali berganti wujud mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PPKM Mikro, PPKM Makro, PPKM Darurat sampai PPKM level 1-4. Jelas saja komunikasi politik seperti ini sangat membingungkan masyarakat yang sedang pusing mencari makan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kajian literatur dan dept interview kepada beberapa key informan seperti Akademisi, pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Paper ini akan menganalisis dan mengelaborasi pola komunikasi publik di era Pandemi Covid-19 yang mengalami perubahan yang sangat radikal.

Kata Kunci : *Strategi, Komunikasi Politik, Pandemi Covid-19,*

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi Pandemi covid-19 hampir semua negara dan pemerintahan benar-benar dibuat tergepoh-gepoh. Bukan hanya negara miskin dan berkembang, negara-negara besar dan maju pun ternyata semua dibuat kewalahan. Dana besar pun tidak menjamin mampu mengendalikan virus yang sudah bermutasi berpuluh-puluh kali ini. Demikian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk paling banyak seindonesia, harus berstrategi agar korban tidak terus semakin berjatuhan.

Menurut data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 (PIKOBAR), per 27 Agustus 2021 total terkonfirmasi sebanyak 686.362 kasus, pasien isolasi dalam perawatan sebanyak 27.706, yang sembuh sebanyak 645.331 orang, yang meninggal 13.325 orang, kontak erat sebanyak 511.970 dan suspek 198.346 orang.

Pemerintah Provinsi Jabar dan warga Jabar mengalami kegamangan dalam memformat kehidupan ke depan dengan pendekatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Komunikasi publik pun terus dibangun dengan melibatkan seluruh kalangan. Pemprov Jabar telah menggaungkan kolaborasi pentahelix dengan kalangan swasta, akademisi, media dan pengusaha dalam rangka melakukan kampanye sosial, penelitian tentang Covid-19, penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini dan menyadarkan masyarakat tentang urgensi penerapan pola hidup sehat.

Komunikasi publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi publik dan dirancang untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan tujuan utama untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui serta membantu memperkuat sosial. Ada empat fungsi komunikasi publik ; informasi, penjelasan, promosi dan dialog.

Untuk menekan angka kasus yang semakin meningkat, Pemerintah pun dipaksa terus mengambil kebijakan berupa pembatasan sosial mulai dari PSPB, PPKM darurat hingga PPKM berlevel-level.

Di Provinsi Jawa Barat kondisinya tidak jauh berbeda. Jabar sebagai provinsi terbesar jumlah penduduknya mengalami problematika sosial, ekonomi dan kesehatan yang lebih rumit dibanding dengan provinsi lainnya. Persoalan covid-19 sangat berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat di suatu tempat. Semakin tinggi mobilitasnya maka semakin besar potensi ketertularannya. Jawa Barat dengan 48,2 juta penduduk memiliki problematika dan kerumitan tersendiri di dalam membatasi pergerakan masyarakatnya.

Penelitian ini mengelaborasi implementasi komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi (gabungan), kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif. Pada pendekatan studi kasus, peneliti mengeksplorasi suatu kejadian, program, proses atau aktivitas. Selain pengumpulan data melalui studi pustaka juga dilakukan depth interview kepada key informan seperti Gubernur Jabar HM. Ridwan Kamil dan Kepala Bappeda Jabar. [1]

C. Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas strategi komunikasi kesehatan, ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu apa itu komunikasi dan apa komunikasi publik.

Komunikasi ([bahasa Inggris](#): *communication*) berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti 'sama' atau *communico*, *communicatio* atau *communicare* yang berarti 'membuat sama' ([bahasa Inggris](#): *make to common*). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Selain itu, definisi lain komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan 'kajian komunikasi' adalah suatu disiplin akademis yang mempelajari proses komunikasi manusia. Adapun jenis komunikasi terdiri dari tiga tipe, diantaranya adalah komunikasi "verbal" yaitu sebuah proses komunikasi yang dilakukan untuk memahami makna sebuah pesan dengan melibatkan pendengaran; komunikasi "tertulis" yang artinya sebuah pesan didapatkan melalui proses [membaca](#); dan komunikasi "nonverbal" atau proses komunikasi yang melibatkan pengamatan seseorang dalam menyimpulkan makna. Kajian komunikasi terdiri dari beragam topik, mulai dari percakapan langsung hingga komunikasi lewat media seperti penyiaran televisi, atau radio. Kajian komunikasi juga menguji bagaimana sebuah pesan ditafsirkan dengan menggunakan dimensi [politik](#), [budaya](#), [ekonomi](#), [semiotika](#), [hermeneutika](#), dan dimensi [sosial](#) berdasarkan konteks komunikasinya. Misalnya ilmu [Statistika](#), merupakan disiplin ilmu dengan pendekatan kuantitatif dalam mengkomunikasikan ilmu eksakta. [Statistika](#) juga merupakan topik dalam penelitian kajian komunikasi, yang sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat klaim.

[2]

Secara bahasa komunikasi publik artinya penyampaian pesan kepada orang banyak. Publik artinya orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebaliknya) (KBBI).

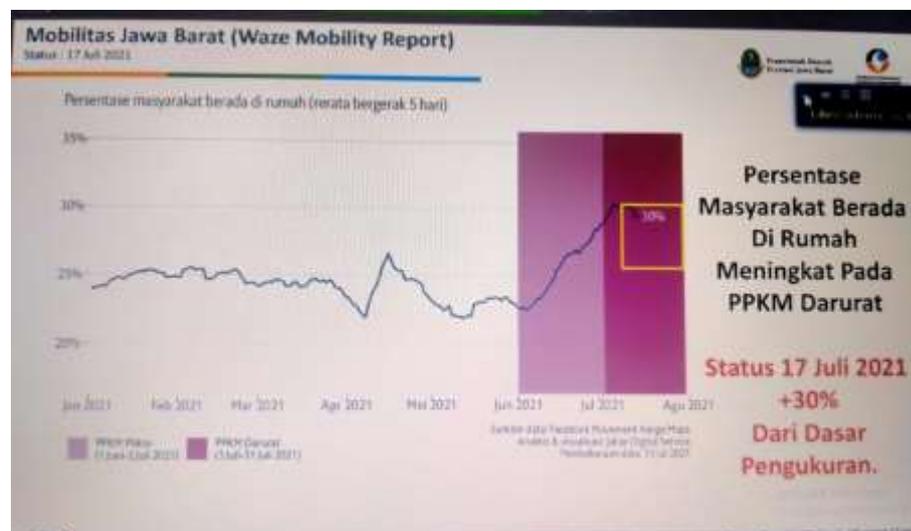
Komunikasi publik adalah penyampaian pesan (message) berupa ide, gagasan, informasi, ajakan dan sebagainya kepada orang banyak. Sarananya bisa media massa, bisa melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar, email, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, spanduk atau apapun yang bisa menjangkau publik. Perlu juga diketahui apa saja karakteristik komunikasi publik. Ciri utama komunikasi publik adalah berisi pesan yang penting diketahui publik yang dikenal dengan informasi publik. Yang dikomunikasikannya menyangkut urusan publik (public affairs) atau yang diharapkan menggugah orang banyak. Adapun ciri yang kedua adalah komunikasi terjadi ditempat umum (ruang publik) seperti auditorium, kelas, tempat ibadah (masjid, gereja) atau tempat lain yang dihadiri sejumlah besar orang.[3]

Adapun strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya ;

Pertama, membuat aplikasi digital yang diberi nama PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa barat). Melalui PIKOBAR ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan komunikasi kesehatan kepada warganya. Melalui aplikasi tersebut seluruh warga Jabar dapat mengakses secara cepat dan akurat tentang perkembangan pandemi Covid-19 di Jawa barat mulai dari jumlah terkonfirmasi, jumlah aktif, jumlah yang sembuh dan jumlah yang meninggal, bahkan warga bisa melakukan konsultasi secara online tentang percovidan.

Aplikasi cerdas ini memuat Call Center Nomor Darurat 119, Chat WA seputar Covid, jumlah kontak erat, jumlah suspek, jumlah Probable, apa yang harus dilakukan, daftar relawan, Hotline seluruh Kota/Kabupaten, Daftar Rumah Sakit rujukan, Info Praktikal, dokumen Keputusan Gubernur termasuk layanan terbaru yaitu informasi dan layanan oksigen.

Dari layanan hotline telekonsultasi/telemedisin didapat data ada 15.471 pengakses, 43.545 pertanyaan dan 99.96 response Rate. Sedangkan layanan permohonan pendistribusian vitamin/obat dengan total permohonan 20.643. Total terdistribusi 12.400 dengan rincian paket A sebanyak 12.046, paket B 219, paket C 47, paket D 62 dan paket E 26.



Gambar 1 ; perkembangan mobilitas warga Jawa Barat

Kedua, menggalakkan strategi kolaborasi pentahelix. Menurut Gubernur Jabar, H. Ridwan Kamil, Pemrop Jabar mengakui sempat tergalap-gagal dalam menangani Pandemi Covid-19. Hal itu dikarenakan pandemi merupakan barang baru. Namun dengan segala macam keterbatasan, Pemprov Jabar telah melakukan kolaborasi dengan semua pihak mulai dari akademisi, dunia usaha, media, TNI juga Polri. Kolaborasi menjadi penguat untuk Pemprov Jabar dalam menangani Pandemi.

Pihak akademisi dan pakar dalam ilmu pengetahuan dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat dilibatkan dalam menangani Covid-19. Hasilnya, inovasi-inovasi telah lahir dari kolaborasi ini, diantaranya perusahaan dan Perguruan Tinggi di Jabar sudah mulai menciptakan ventilator untuk pasien Covid-19. Pendekatan kolaboratif ini juga dilakukan bersama aparaturnya Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat, lebih dari Rp. 11 Milyar rupiah terkumpul untuk penanganan Pandemi di Jabar.

Ketiga, Preventif, test/track dan peningkatan fasilitas kesehatan. Hingga saat ini Pemprov Jabar sudah melakukan test kepada hampir 200 ribu masyarakat. Menurut penuturan Gubernur Jawa Barat, Pemprov Jabar telah menyiapkan tenaga tracer sebanyak 16.182 trecer. Terdapat penambahan tenaga tracer Puspa Jabar 289 orang dan kader/PKK 3.100 orang. Adapun rasio kasus aktif/Tenaga Treceer, 7 kasus aktif ditrace 1 orang. Adapun sampai 23 Juli 2021 Jabar telah memiliki 126 Labkes jejaring dengan kapasitas labkes 25.000 PCR test per hari dari target testing Jabar sebanyak 107.366 per hari.

Keempat, strategi jaring pengaman sosial. Berupa pemberian bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai yang dibagikan selama empat bulan terhitung Mei sampai Agustus 2020.

Kelima, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar 2021 yang berisi ; 1. strategi pemulihan ekonomi, 2. Reformasi sistem kesehatan daerah, 3. Reformasi sistem perlindungan sosial, 4. Reformasi sistem ketahanan bencana. [4]

D. Simpulan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikomandani Ridwan Kamil telah melaksanakan strategi komunikasi publik secara cerdas dan efektif. Penerapan kebijakan ditengah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak serta melek akan media dan informasi memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih populis dan holistik. Strategi kolaborasi pentahelix dan penggunaan aplikasi PIKOBAR sangat efektif dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- [1] D. & S. Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya, 2007.
- [2] “<https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi>.” .
- [3] “<https://romeltea.com/pengertian-komunikasi-publik/>.” .
- [4] “<https://jabarprov.go.id/>.” .